

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SKPD : BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PA/KPA : KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA**

PPK :

PROGRAM :

**NAMA : PENYUSUNAN KAJIAN ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN EKONOMI JAKARTA DAN MITIGASI
DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN)**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penyusunan Dokumen Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 2019. Presiden menyampaikan selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Karena itu perlu dilakukan pemindahan ibu kota negara.

Pemindahan ibu kota negara akan berdampak terhadap perekonomian Jakarta. Hasil perhitungan BPS Provinsi DKI Jakarta (2019) menunjukkan konsekuensi umum ekonomi pemindahan ibu kota adalah berkurangnya nilai PDRB DKI Jakarta. Dampak total nilai tambah yang akan berkurang sekitar Rp340 triliun atau sekitar 16-23% dari total PDRB. Penjelasan sebagai berikut: dampak langsung pada sektor pemerintah yaitu kemungkinan berkurangnya nilai PDRB sekitar Rp280 triliun (10-13% terhadap total PDRB). Hal ini karena kontribusi belanja pemerintah pusat (APBN) terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada PDRB DKI Jakarta sebesar 80-90%. Dampak langsung pada sektor investasi (PMTB) yaitu kemungkinan nilai PDRB berkurang sekitar Rp60 triliun atau sekitar 2-5% terhadap nilai PDRB.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mendapat kewenangan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat otonomi khusus dalam rangka penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Provinsi Aceh mendapat otonomi khusus dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Otonomi khusus pada Provinsi DIY diimplementasikan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kerajaan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta mendapat otonomi khusus dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Apabila Ibu Kota Negara pindah, maka Jakarta akan kehilangan kedudukannya tersebut. Karena itu perlu dilakukan analisis mendalam terkait kewenangan khusus Jakarta.

Perekonomian Jakarta tahun 2021 tumbuh sebesar 3,56% (ctc) bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -2,39% (ctc). Pertumbuhan ini didorong kinerja dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2010-2021 (ctc, %)
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2022)

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional yaitu sebesar 17,19%, kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebesar 14,48%, Jawa Barat sebesar 13,03%, Jawa Tengah sebesar 8,38% dan Sumatera Utara 5,07%. Kondisi pandemi membuat kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional semakin menurun.

Tabel 1. Kontribusi Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Nasional (%)

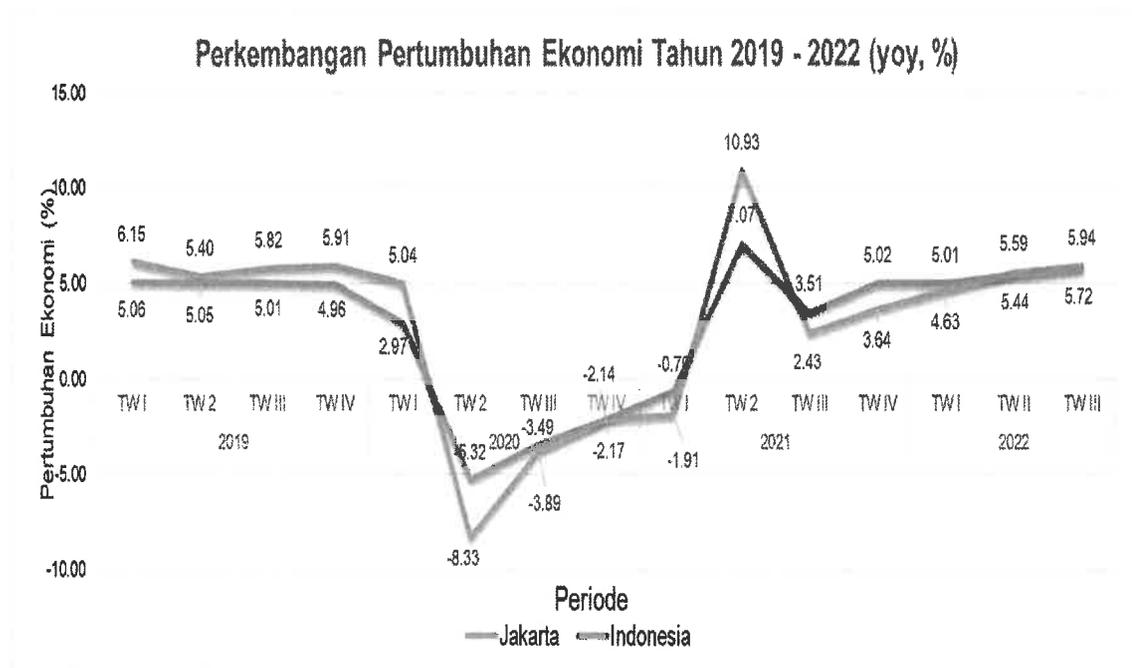
No	Provinsi	2020	2021
1	DKI Jakarta	17,55	17,19
2	Jawa Timur	14,58	14,48
3	Jawa Barat	13,22	13,03
4	Jawa Tengah	8,55	8,38
5	Sumatera Utara	5,14	5,07

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2022)

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,94% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,72% (yoy). Penurunan kasus COVID-19 mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Kembali normalnya aktivitas masyarakat, baik untuk bekerja, sekolah, bisnis, berwisata, dan lain-lain turut berperan dalam naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mendorong peningkatan permintaan baik domestik maupun internasional.

Namun, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ini masih tertahan karena sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga komoditas secara umum.

Perekonomian Jakarta pada triwulan III-2022 tumbuh 5,94% (yoy). Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu dari sisi produksi, adalah lapangan usaha Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Transportasi dan Pergudangan.



Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta-Indonesia (yoy, %)

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2022)

Pengesahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, memberikan peluang untuk mendefinisikan kembali kedudukan, fungsi dan peran Jakarta Ke Depan.

Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis yang memiliki nilai sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan peran strategis sebagai penopang utama pembangunan ekonomi nasional. Jakarta ke depan, meskipun tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, akan berperan sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, investasi dan pusat pelayanan serta kegiatan bisnis nasional berskala regional dan global yang didukung ekosistem digital dan berkelanjutan. Visi Jakarta ke depan yaitu mewujudkan kota bisnis dan pusat perekonomian nasional berskala regional dan global yang lestari, berbudaya, yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan.

Jakarta telah melakukan banyak transformasi, namun capaian-capaian tersebut belum cukup. Jakarta ke depan harus menjadi kota layak huni yang nyaman untuk

untuk menjadi tempat tinggal dan bekerja, serta unggul dan berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota global. Lima pilar utama yang menjadi landasan untuk meningkatkan peran Jakarta ke depan, yaitu:

Pertama, tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional berbasis ekonomi kota; dengan cara menjadi pusat perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor impor, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan, mendukung industri yang ramah lingkungan serta memajukan UMKM agar go digital dan go global.

Kedua, kesejahteraan dan kemajuan bagi warga lokal dan global; dengan konsep kebutuhan dasar masyarakat sepanjang siklus hidup terjamin, pendidikan dan kesehatan berkelas dunia serta mewujudkan kota yang aman, nyaman dan ramah bagi semua.

Ketiga, ruang kota yang kompak, lestari dan berkeadilan; dengan cara pembangunan berorientasi transit dan digital; kota yang berketahanan; infrastruktur yang mendukung iklim bisnis; pengembangan kawasan pesisir, perairan dan kepulauan yang terpadu; serta mewujudkan hunian layak dan berkeadilan.

Keempat, mobilitas orang dan barang yang efektif dan efisien; dengan mengurangi kemacetan, mewujudkan transportasi publik yang mudah dan nyaman, sistem logistik yang efisien.

Kelima, mewujudkan kota cerdas yang didukung ekosistem digital yang terintegrasi dan mutakhir dalam aspek infrastruktur, masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan perekonomian.

Pemindahan ibu kota sebuah negara merupakan peristiwa penting, baik bagi ibu kota negara yang baru (*new capital city*) maupun bagi daerah yang tidak lagi menjadi ibu kota (*old capital city*). Beberapa negara seperti United State of America, Australia, Myanmar, Kazakstan, Brazil dan beberapa negara lainnya telah melakukan upaya pemindahan ibu kota negaranya. Sebagian negara berhasil dan sebagai lagi kurang berhasil menyeimbangkan antara pembangunan di *new capital city* dan *old capital city*, karena itu sangat penting mengambil *benchmarking* dan *best practice* dari *success story* proses pemindahan ibu kota dan/atau pembangunan/pengembangan sebuah kota dan/atau pembiayaan sebuah kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun kajian arah kebijakan pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mengingat pentingnya pembuatan kajian ini maka Penyedia Jasa/Konsultan/Tenaga Ahli yang digunakan berbentuk perusahaan yang memiliki afiliasi internasional dan/atau merupakan *member of group* dari perusahaan multinasional yang telah memiliki pengalaman membuat kajian pemindahan ibu kota atau pembangunan/pengembangan sebuah kota atau pembiayaan sebuah kota. Manfaat utama memiliki afiliasi internasional adalah dapat

mengakses dan mendapatkan sumber daya baik personil maupun hasil kajian terdahulu secara langsung. Manfaat lainnya yaitu dapat berbagi data dan informasi dengan perusahaan afiliasi yang telah memiliki pengalaman, kemampuan dan analisa untuk *benchmarking* dan mencari *best practice* dari *success story* proses pemindahan ibu kota dan/atau pembangunan sebuah kota dan/atau pembiayaan sebuah kota di negara-negara lain.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk memperoleh gambaran kebijakan arah pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak pemindahan IKN terhadap perekonomian di Jakarta yang perlu dilakukan baik dalam jangka pendek (sampai dengan 5 tahun), jangka menengah (5 sampai 20 tahun), dan jangka panjang (di atas 20 tahun).

Tujuan kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk:

- 1) mengetahui dampak ekonomi Jakarta pasca pemindahan IKN;
- 2) mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta;
- 3) mengetahui konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Lintas Provinsi Jakarta Raya;
- 4) melakukan Survei kepada masyarakat dan dunia bisnis terkait dampak pemindahan Ibu Kota;
- 5) melaksanakan FGD untuk mendapatkan masukan usulan strategi sektor privat, kementerian/lembaga/instansi/akademisi atau pihak lain terkait arah kebijakan pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN);
- 6) mengetahui alternatif pembiayaan pembangunan kota;
- 7) mendapatkan rekomendasi visi, strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek (sampai dengan 5 tahun), jangka menengah (5 sampai 20 tahun), dan jangka panjang (di atas 20 tahun), dalam rangka mempersiapkan Jakarta sebagai kota global, dengan memerhatikan arah kebijakan pemerintah pusat untuk masing-masing sektor;
- 8) mengetahui proyeksi nilai perekonomian Jakarta dalam jangka panjang pada kondisi *business as usual* dan pada kondisi jika dilakukan rekomendasi strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret.
- 9) melaksanakan Seminar/FGD untuk mendapatkan masukan atas hasil kajian arah kebijakan pembangunan ekonomi yang telah disusun;

3. Sasaran

Sasaran dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah:

- 1) Tersedianya analisis pengukuran dampak ekonomi (dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak total) pemindahan Ibu Kota terhadap sektor lapangan usaha, analisis pengujian biaya dan manfaat, analisis sensitivitas;
- 2) Tersedianya analisis sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta;
- 3) Tersedianya konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Lintas Provinsi Jakarta Raya;
- 4) Tersedianya hasil Survei masyarakat dan dunia bisnis terkait dampak pemindahan Ibu Kota;
- 5) Terselenggaranya FGD untuk mendapatkan masukan usulan strategi sektor privat, kementerian/lembaga/instansi/akademisi atau pihak lain terkait arah kebijakan pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN);
- 6) Tersedianya analisis alternatif pembiayaan pembangunan kota;
- 7) Tersedianya rekomendasi strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek (sampai dengan 5 tahun), jangka menengah (5 sampai 20 tahun), dan jangka panjang (di atas 20 tahun) dalam rangka mempersiapkan Jakarta sebagai kota global, dengan memerhatikan arah kebijakan pemerintah pusat untuk masing-masing sektor.
- 8) Tersedianya proyeksi nilai perekonomian Jakarta dalam jangka panjang pada kondisi business as usual dan pada kondisi jika dilakukan rekomendasi strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret
- 9) Terselenggaranya Seminar/FGD untuk mendapatkan masukan atas hasil kajian arah kebijakan pembangunan ekonomi yang telah disusun;

Berbagai pendekatan dan metodologi ditujukan untuk mengukur, menghitung, menganalisis dan membuat rekomendasi pembuatan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara.

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, yang dianggarkan dalam DPA SKPD Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor 132/DPA/2023 Tanggal 2 Januari 2023, senilai Rp 3.101.357.760 (Tiga Miliar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Saraswati

Satuan Kerja: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Data Penunjang

7. Data Dasar

Sebelum melaksanakan kegiatan pekerjaan, Penyedia Jasa terlebih dahulu konsultasi dengan Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dalam hal memperoleh data dan informasi mengenai Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (diedarkan secara terbatas);
- 2) Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (diedarkan secara terbatas);
- 3) Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah;
- 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain tentang program kewirausahaan, perindustrian, ekonomi kreatif, dan lain-lain;
- 5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 6) Data Indikator Perekonomian Daerah, antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Inflasi, Investasi, Pariwisata, dan lain-lain;

- 7) Data sektoral yang diproduksi oleh Perangkat Daerah dan BUMD, antara lain data realisasi pendapatan dan belanja daerah, data jumlah kendaraan, data jumlah UMKM, data aset BUMD, data pangan, data kunjungan wisatawan, data realisasi investasi, data ketenagakerjaan, dan lain-lain.
- 8) Apabila diperlukan, Penyedia Jasa dapat memperoleh data primer melalui survei lapangan ataupun informasi yang diberikan secara langsung oleh narasumber dari Perangkat Daerah dan/atau BUMD tertentu melalui metode wawancara/diskusi, dengan dikoordinasikan oleh pengguna jasa.

8. Standar Teknis

Pembuatan kajian ini menggunakan standar-standar ilmiah, antara lain mencakup latar belakang, tujuan penulisan, studi terdahulu, metode penelitian, analisa dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi saran kebijakan.

9. Studi-Studi Terdahulu

Studi Indef (2022) menunjukkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur berdampak terhadap perekonomian Jakarta baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kajian ini juga menyimpulkan:

Kebijakan pemindahan IKN DKI Jakarta ke IKN Kalimantan Timur berdampak terhadap kinerja ekonomi DKI Jakarta, mayoritas menunjukkan penurunan kinerja ekonomi baik indikator makro maupun lapangan usaha. Dan terjadi kerugian ekonomi atas PDRB Jakarta pasca pemindahan IKN.

- 1) Sektor-sektor ekonomi yang berpotensi sangat besar dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta sebagai kota/provinsi sebagai pusat bisnis/perdagangan dan ekonomi global pasca pindah IKN ke Kalimantan Timur dalam rangka menjaga ketahanan perekonomian nasional melalui sektor potensial prioritas yaitu Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan dan Sektor Pariwisata.
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun mitigasi-mitigasi kebijakan akibat pemindahan IKN, baik kebijakan dalam jangka pendek 2022-2024, jangka menengah 2025-2030 dan jangka panjang 2031-2045.
- 3) Revisi atas rancangan Undang-Undang Provinsi Jakarta dan review naskah akademis, perlu disesuaikan dengan perubahan dan dinamika revisi dari aspek hukum/legal formal Undang-Undang sepanjang periode kajian.
- 4) Perpindahan IKN memicu terjadinya perubahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dibidang keuangan dan pembiayaan. Perubahan kewenangan tersebut seiring dengan Jakarta menjadi Provinsi Khusus Ekonomi dan Perdagangan/ Bisnis level dunia.

- 5) Konsekuensi perubahan kekhususan Jakarta, maka Pengembangan Kawasan Ekonomi Lintas Provinsi Jakarta Raya sebagai pilihan. Dimana kekhususan tersebut tetap memperhatikan rambu-rambu regulasi yang berlaku salah satunya tata ruang.
- 6) Pengelolaan aset-aset Pemerintah Pusat yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah menjadi salah satu syarat dalam pengembangan Jakarta sesuai perundangan yang berlaku.
- 7) Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memastikan bahwa materi muatan pasal yang disusun di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta Raya dapat harmonis baik secara vertikal maupun horizontal, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang yang terkait dengan keuangan daerah, ekonomi dan demografi, aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, mobilitas, lingkungan, kawasan dan hunian.
- 8) Kebijakan dan materi muatan pasal diterangkan dengan metode ilmiah, mulai dari kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain, kajian terhadap implikasi terhadap sistem baru yang akan diatur dalam RUU terhadap aspek beban keuangan negara dan kemanfaatan negara.

10. Referensi Hukum

Referensi Hukum yang dapat digunakan untuk pembuatan kajian ini diantaranya:

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yaitu:

- 1) Analisis dampak ekonomi Jakarta pasca pemindahan IKN antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran (konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, perdagangan luar negeri), tenaga kerja, kerugian ekonomi Jakarta dan dampak lainnya;
- 2) Analisis sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta;
- 3) Analisis konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Lintas Provinsi Jakarta Raya dengan daerah sekitarnya antara lain Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);
- 4) Untuk mendapatkan masukan terkait dampak pemindahan Ibu Kota terkait analisis peluang dan tantangan/risiko yang mungkin timbul, penyedia jasa dapat melakukan survei kepada masyarakat dan dunia bisnis;
- 5) Untuk mendapatkan usulan strategi bagi Jakarta terkait arah kebijakan pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penyedia jasa dapat melaksanakan FGD dengan sektor privat, kementerian/lembaga/instansi/akademisi atau pihak lain;
- 6) Analisis alternatif pembiayaan pembangunan/pengembangan kota antara lain seperti, kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), obligasi/sukuk daerah, pinjaman daerah, hibah luar negeri, tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dan sumber pembiayaan lainnya.
- 7) Memberikan rekomendasi visi, strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek (sampai dengan 5 tahun), jangka menengah (5 sampai 20 tahun), dan jangka panjang (di atas 20 tahun) dalam rangka mempersiapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis berskala global, dengan memerhatikan arah kebijakan pemerintah pusat untuk masing-masing sektor.
- 8) Analisis proyeksi nilai perekonomian Jakarta dalam jangka panjang pada kondisi *business as usual* dan pada kondisi jika dilakukan rekomendasi strategi, arah kebijakan pembangunan ekonomi, dan program konkret.

- 9) Seminar/FGD untuk mendapatkan masukan terkait respon dan strategi sektor privat, kementerian/lembaga/instansi/akademisi atau pihak lain terhadap pemindahan IKN.

Metode Penelitian

Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilaksanakan berdasarkan studi dengan metode penelitian yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. metode deskriptif analitis.
2. studi pustaka dan observasi lapangan.
3. Survey pelaku pasar dan para stakeholder
4. *Benchmark* dengan kota-kota global lainnya
5. Analisis data menggunakan rumus ekonomi/keuangan/investasi, misalnya Input-Output, Inter Regional Input-Output (IRIO), Cost – Benefit Analysis
6. Metode penelitian lainnya

Selain itu dalam studi dilakukan kajian dan analisis terhadap manfaat dan risiko yang diusulkan akan diperhitungkan dengan rinci dari berbagai sektor lapangan usaha. Kajian dan analisis dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif manfaat dan risiko yang akan dan mungkin terjadi akibat pelaksanaan pemindahan Ibu Kota, termasuk langkah-langkah mengatasi risiko tersebut.

12. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah tersedianya Laporan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan material berupa data-data untuk mendukung pembuatan kajian. Pejabat Pembuat Komitmen akan memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Penyedia Jasa Konsultasi menggunakan peralatan dan material yang dimiliki untuk mendukung pembuatan kajian.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan Penyedia Jasa adalah pelaksanaan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), meliputi:

- a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan/analisis.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, serta sudah diterima paling lambat satu minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kajian.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu Tenaga Ahli selama 5 (lima) bulan Tahun Anggaran 2023 periode April 2023-Agustus 2023.

17. Personel

Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa agar menyediakan tenaga yang diperlukan dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini. Daftar personel beserta kualifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga ahli terdiri dari:

Tabel 2. Posisi dan Persyaratan

No	Posisi	Persyaratan	Jml
1.	<i>Team Leader/Senior Economist Expert/Ahli Ekonomi</i>	a. memiliki pendidikan minimal S2 atau Master Degree b. Pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun pada pekerjaan analisis ekonomi/ keuangan/ manajemen	1 Org

No	Posisi	Persyaratan	Jml
		<p>keuangan/ manajemen strategis/ investasi di perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman internasional dan pernah bekerja dengan lembaga atau perusahaan internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekonomi/ manajemen keuangan/ bisnis/ akuntansi/ Kebijakan Publik dari asosiasi atau lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.</p>	
2.	Anggota:		5 Org
	<p>a. <i>Senior Economist Expert /Tenaga Ahli Investasi</i></p>	<p>a. memiliki pendidikan minimal S2 atau Master Degree</p> <p>b. Pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun pada pekerjaan analisis investasi dan pembiayaan di perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan di bidang Investasi dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekonomi/ manajemen keuangan/ bisnis/ akuntansi dari asosiasi atau</p>	1 Org

No	Posisi	Persyaratan	Jml
		lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.	
	b. <i>Senior Economist Expert / Tenaga Ahli Fiskal</i>	<p>a. memiliki pendidikan minimal S2 atau Master Degree</p> <p>b. Pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun pada pekerjaan analisis keuangan/ fiskal di perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan di bidang Manajemen Keuangan/ Fiskal dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekonomi/ akuntansi/ fiskal dari asosiasi atau lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.</p>	1 Org
	c. <i>Senior Infrastructure Expert / Tenaga Ahli Pengembangan Infrastruktur</i>	<p>a. Memiliki pendidikan minimal S2 atau Master Degree</p> <p>b. Pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun pada pekerjaan Perencanaan & Perancangan Kota atau Sistem Infrastruktur Wilayah & Kota atau Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan Kebijakan konstruksi/ infrastruktur atau manajemen proyek di perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan di bidang Perencanaan & Perancangan Kota</p>	1 Org

No	Posisi	Persyaratan	Jml
		<p>atau Sistem Infrastruktur Wilayah & Kota atau Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan Kebijakan dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. Memiliki sertifikasi keahlian dibidang Teknik Sipil/ Arsitektur/ Perencanaan Wilayah Kota/ Ekonomi atau sejenisnya dari asosiasi atau lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.</p>	
	d. Konsultan Bisnis / Ahli Manajemen	<p>a. memiliki pendidikan minimal S1 atau Bachelor Degree.</p> <p>b. Pengalaman minimal 8 (delapan) tahun pada pekerjaan manajemen keuangan/ manajemen risiko/ manajemen strategis/ tata kelola di perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan di bidang manajemen keuangan atau manajemen risiko atau manajemen strategis atau tata kelola dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekonomi/ manajemen dari asosiasi atau lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.</p>	1 Org
	e. Konsultan Bisnis /Ahli Keuangan	<p>a. memiliki pendidikan minimal S1 atau Bachelor Degree.</p> <p>b. Pengalaman minimal 8 (delapan) tahun pada pekerjaan manajemen keuangan/ akuntansi/ audit/ asurans di</p>	1 Org

No	Posisi	Persyaratan	Jml
		<p>perusahaan atau lingkungan pemerintahan berskala nasional atau internasional dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>c. Wajib memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan di bidang manajemen keuangan atau akuntansi atau audit atau asurans dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja atau kontrak terdahulu.</p> <p>d. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang manajemen keuangan/ akuntansi/ audit/ asurans dari asosiasi atau lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri.</p>	

- b. memiliki pengalaman melakukan kajian ekonomi/ manajemen/ investasi pada Pemerintahan dan Badan Usaha.
- c. Tenaga ahli melampirkan ijazah, KTP, pengalaman kerja dan sertifikasi yang disyaratkan.
- d. tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli antara lain sebagai berikut:
 - 1) *Team Leader*
 - a) Membuat *schedule* kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan
 - b) Memonitor atau memantau *progress* pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli
 - c) Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua tenaga ahli yang berada yang berada dibawah tanggung jawabnya
 - d) Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerja sama team yang solid
 - e) Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan
 - f) Mengkoordinir seluruh aktifitas tim dalam mengelola seluruh kegiatan baik di lapangan maupun di kantor

- g) Bertanggung jawab terhadap Pengguna Jasa yang berkaitan terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan
 - h) Membimbing dan mengarahkan anggota tim dalam mempersiapkan semua laporan yang diperlukan
 - i) Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan
 - j) Membuat dan mengumpulkan hasil kajian masing-masing tenaga ahli kedalam satu laporan.
 - k) Menyusun kerangka visi dan misi pembangunan ekonomi Jakarta di masa depan.
 - l) Melaksanakan presentasi di setiap pertemuan dengan Pemberi Pekerjaan dan instansi terkait.
- 2) Tenaga Ahli Investasi
- a) Menyusun asumsi dan parameter untuk menilai kelayakan investasi
 - b) Melakukan analisis kelayakan investasi dari aspek manajemen strategis/rencana bisnis.
 - c) Melakukan analisis peluang investasi untuk mendorong penanaman modal dalam dan luar negeri di Jakarta.
 - d) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada *Team Leader*.
- 3) Tenaga Ahli Fiskal
- a) Menyusun asumsi dan parameter untuk menilai kelayakan fiskal
 - b) Melakukan analisis kelayakan fiskal termasuk analisis manfaat dan biaya.
 - c) Melakukan analisis kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menilai kondisi eksternal dan internal atas rencana fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - d) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada *Team Leader*.
- 4) Tenaga Ahli Pengembangan Infrastruktur
- a) Menyusun asumsi dan parameter untuk menilai kelayakan proyek infrastruktur kota.
 - b) Melakukan analisis kelayakan proyek-proyek konstruksi/infrastruktur.
 - c) Melakukan analisis kebutuhan proyek infrastruktur yang mendukung Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.
 - d) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada *Team Leader*.
- 5) Tenaga Ahli Manajemen
- a) Melakukan riset pasar pada industri – industri yang ada di Jakarta.

- b) Mengidentifikasi pembangunan industri potensial Jakarta.
 - c) Melakukan penelitian potensi industri baru/ peluang industri baru di Jakarta.
 - d) Melakukan cascading terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi Jakarta
 - e) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada *Team Leader*.
- 6) Tenaga Ahli Keuangan
- a) Melakukan analisis keuangan untuk melihat kualitas/kemampuan keuangan.
 - b) Mengidentifikasi sumber-sumber alternatif pembiayaan pembangunan kota sesuai dengan kemampuan keuangan.
 - c) Melakukan analisis proyeksi kebutuhan dan kemampuan keuangan di masa depan.
 - d) Melakukan analisis alternatif pembiayaan untuk proyek pembangunan kota.
 - e) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada *Team Leader*.

Persyaratan Penyedia

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Penyedia Jasa agar memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:
 - a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b) Peserta kualifikasi badan usaha harus memiliki ijin usaha bidang jasa konsultasi manajemen (KBLI 70209).
- 2) Perusahaan yang berafiliasi internasional (*member of group*) dibuktikan dengan surat keanggotaan atau surat keterangan direksi atau terdaftar dalam website global.
- 3) Afiliasi global memiliki pengalaman membuat kajian pemindahan ibu kota atau pembangunan/pengembangan sebuah kota dibuktikan dengan hasil kajian atau kontrak.
- 4) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- 7) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
- a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
- a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Tidak akan melakukan tuntutan hukum seandainya ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 10) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
- 2) Memiliki sumber daya manusia:
 - a) Manajerial; dan
 - b) tenaga kerja (jika diperlukan).
- 3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu Tenaga Ahli selama 5 (lima) bulan Tahun Anggaran 2023 periode April 2023-Agustus 2023.

Tabel 3. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	APRIL				MEI					JUNI				JULI				AGUSTUS					
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	
1	Penyempurnaan data, studi literatur, benchmarking dengan negara lain, penjelasan metodologi	■	■	■	■																			
2	Penyerahan laporan pendahuluan					■																		
3	Seminar FGD/ Public Hearing Tahap I						■																	
4	Analisis pengujian dan pengukuran dampak ekonomi terhadap PDRB							■	■	■														
5	Melakukan analisis dan pengujian untuk menentukan standar pertumbuhan ekonomi baru potensial								■	■	■													
6	Analisis konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Lintas Pradisi Jakarta Raya									■	■	■												
7	Melakukan survei kepada masyarakat dan dunia bisnis terkait dampak pemindahan ibu kota											■	■											
8	Penyerahan laporan lanjutan													■										
9	Analisis alternatif pembiayaan pembangunan kota														■	■	■							
10	Perumusan rangkai visi, strategi, arah kebijakan, dan program konkret															■	■	■	■					
11	Analisis proyeksi nilai perekonomian Jakarta dalam jangka panjang																		■	■				
12	Seminar FGD/ Public Hearing Tahap II																				■			
13	Penyerahan dan pembahasan rancangan laporan akhir																					■		
14	Penyerahan laporan akhir																						■	

Laporan

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat sekurang-kurangnya gambaran umum, inventarisasi data, tinjauan literatur dan/atau kerangka teoritis, pembelajaran baik pemindahan ibu kota di negara lain (*benchmarking*), dan metodologi.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 35 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, sebanyak 3 eksemplar buku laporan.

20. Laporan Lanjutan

Laporan Lanjutan memuat sekurang-kurangnya gambaran umum, inventarisasi data, tinjauan literatur dan/atau kerangka teoritis, pembelajaran baik (*best practice*) pemindahan ibu kota di negara lain (*benchmarking*), metodologi, hasil analisis data, survei, dan informasi lainnya yang telah diperoleh.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 100 hari kalender sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 3 eksemplar buku laporan.

21. Rancangan Laporan Akhir

Laporan ini memuat sekurang-kurangnya gambaran umum, inventarisasi data, tinjauan literatur dan/atau kerangka teoritis, pembelajaran baik pemindahan ibu kota di negara lain (*benchmarking*), metodologi, hasil analisis data, survei, dan informasi lainnya yang telah diperoleh, serta rekomendasi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 140 hari kalender sejak SPMK sebanyak 3 eksemplar.

22. Laporan Akhir

Laporan ini memuat hasil kajian akhir. Laporan *hardcover* diserahkan paling lambat 150 hari kalender sejak SPMK, sebanyak 15 eksemplar, disertai dengan salinan digital (*soft copy*) laporan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, disertai dengan data, formula, tabel, asumsi yang digunakan, kertas kerja, dan informasi lain yang relevan.

Hal-Hal Lain

23. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan Jasa Konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan Kerja Sama

Jika kerja sama dengan Penyedia Jasa Konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

Kerjasama hanya dilakukan (bila perlu) dengan afiliasi/group dari penyedia jasa, dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Perolehan dan pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Data terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan indikator makro ekonomi lainnya dapat diperoleh penyedia jasa pada situs web Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS Jakarta.
- b. Data terkait realisasi dan pertumbuhan investasi dapat diperoleh penyedia jasa pada situs web Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Untuk mendapatkan masukan terkait dampak pemindahan Ibu Kota terkait analisis peluang dan tantangan/risiko yang mungkin timbul, penyedia jasa dapat melakukan survei kepada masyarakat dan dunia bisnis, *benchmarking* kota-kota di negara lain, atau sumber lainnya yang relevan.
- d. Untuk mendapatkan usulan strategi bagi Jakarta terkait arah kebijakan pembangunan ekonomi dan mitigasi dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penyedia jasa dapat melaksanakan FGD dengan sektor privat, kementerian/lembaga/instansi/akademisi atau pihak lain yang terkait.

26. Alih Pengetahuan, Hak Kepemilikan dan Layanan Purnatugas

26.1. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan.

26.2. Hak Kepemilikan

- a. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta berhak atas kepemilikan semua barang/bahan, lisensi, dan hak cipta yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa/Tenaga Ahli kepada Biro Perekonomian dan Keuangan;
- b. Penyedia Jasa/Tenaga Ahli paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Jasa/Tenaga Ahli kepada Biro Perekonomian dan Keuangan.

26.3. Layanan Purnatugas

Setelah selesai seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Perumusan Kebijakan Keuangan, Biro Perekonomian dan Keuangan sebagai pemberi pekerjaan berhak mendapatkan komitmen dari penyedia jasa untuk membantu Biro Perekonomian dan Keuangan dalam memaparkan hasil kajian kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 19 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SARASWATI
NIP 197812272010012017